

JURNAL AKUNTANSI, 2 (April), 151-179. ©Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Gedung Karol Wojtyła, Jalan Jenderal Sudirman 51 Jakarta 12930

RASIO PAJAK OPTIMAL DAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1970--2008

Andang Wirawan Setiabudi*

ABSTRACT

Many economists have stated that the government through its either fiscal policies or monetary policies has an important role in supporting economic growth of a country. As the consequence of government's role in the development process, the size of the government – measured as the ratio of total spending to GDP also expanded along with the economic development. This is the fact faced by any country in the world. However, the growth of government's size implies higher taxation, and thus, it sometimes become a bad sign for the whole economy. The higher tax collected by the government the more productive source taken by the government from the private sector. If positive impacts of government spending cannot exceed negative impact caused by the lost of productive source of private sectors deadweight loss of economy will appear. By assuming that government runs balanced budget in which all of the government expenditure is financed by tax revenue, so the growth maximizing tax ratio can be estimated. This rate measures the ratio of tax revenue to GDP that is needed to achieve the high and stable growth rate. The main objective of this study are to find the growth maximizing tax ratio for Indonesia and to analyze whether Indonesia has achieved this optimum point, or has been operating below it or contrary above it. The regression result show that the growth maximizing tax ratio for Indonesia is 14,64%.

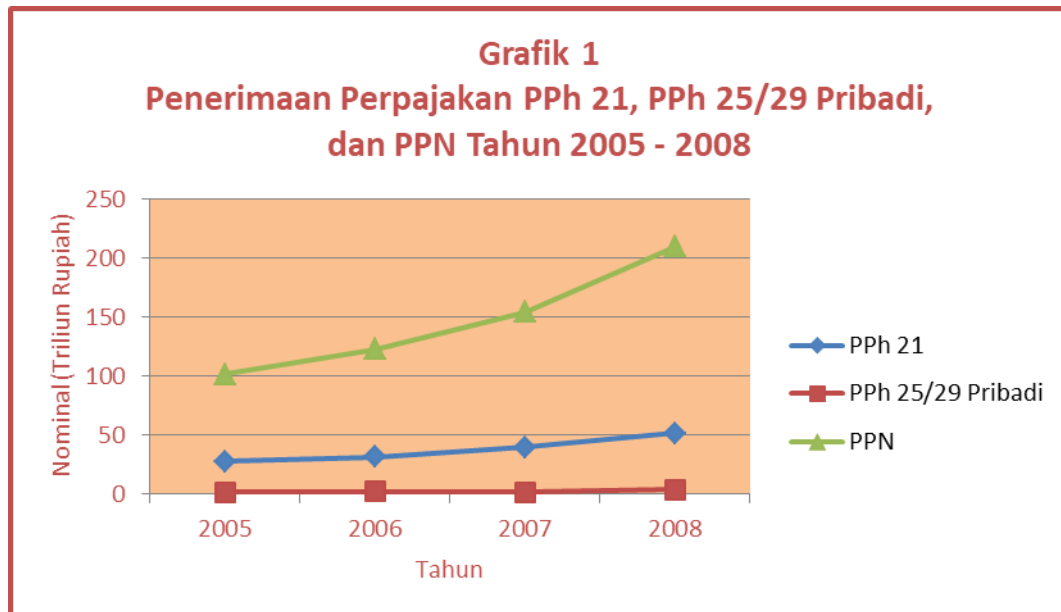
Key words: optimum tax ratio, economic growth, tax revenue

1. PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini, dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah memberikan beban yang berat terhadap sektor pajak

* Unika Atma Jaya, Jakarta

dalam upaya memberikan kontribusi pada pembangunan. Sadar akan fungsinya sebagai tulang punggung dalam membiayai pembangunan, penerimaan pajak dari waktu ke waktu terus ditingkatkan yang dapat dilihat dari *tax ratio* sebagai indikatornya. Grafik penerimaan pajak dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : Nota Keuangan 2005 -2008 (diolah)

Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Logikanya, semakin tinggi nilai *tax ratio*, semakin patuh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya di negara tersebut. Negara maju (OECD) memiliki rata-rata *tax ratio* di atas 30%, bahkan Swedia memiliki *tax ratio* sebesar 53%.

Data empiris di Indonesia menunjukkan bahwa *tax ratio* cenderung meningkat setiap tahun, tetapi tidak lebih dari 15%. Ketika Presiden SBY baru menjabat pada tahun 2004 *tax ratio* Indonesia sebesar 12,3% dan pada 2005 terjadi peningkatan menjadi 12,7%. Pada tahun 2008, dengan asumsi target penerimaan pajak tercapai Rp525,5 triliun dan PDB diperkirakan Rp3.500 triliun, diprediksikan *tax ratio* akan mencapai 15,1%. Apakah *tax ratio* sebesar itu sudah

sesuai untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan? Berapakah besaran *tax ratio* yang tepat bagi bangsa Indonesia?

Sebagai konsekuensi dari peranan pemerintah dalam pembangunan, pengeluaran pemerintah tumbuh dengan sangat pesat melebihi pertumbuhan PDB. Dengan kata lain, rasio jumlah pengeluaran pemerintah terhadap PDB atau biasa juga disebut ukuran pemerintah (*the size of government*) yang semakin membesar dari waktu ke waktu. Hal ini wajar terjadi di negara manapun di dunia, terutama bagi negara yang sedang dalam proses pembangunan.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana pemerintah dapat membiayai pengeluarannya yang semakin membengkak tersebut. Dua pilihan yang tersedia pada saat itu adalah bergantung pada pinjaman luar negeri atau bergantung pada kemampuan domestik. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesiamemilih untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan asing dan mengusahakan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Ini terbukti dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan IGGI dan dilanjutkan dengan melepaskan diri dari IMF.

Dari berbagai sumber penerimaan domestik yang tersedia, pemerintah menyadari bahwa penerimaan dari sektor perpajakan haruslah dijadikan tumpuan utama, baik penerimaan pajak hasil minyak (OTR/*oil tax revenue*) ataupun penerimaan pajak non minyak (NOTR/*on oil tax revenue*)[†]. Mengingat penerimaan OTR sangat tergantung pada fluktuasi harga komoditi tersebut di pasaran dunia, pemerintah menekankan pada pentingnya peranan NOTR.

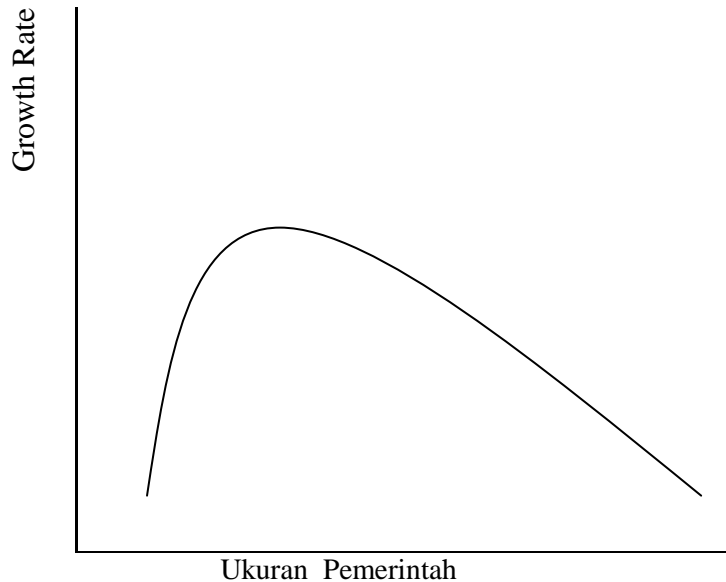
Meskipun demikian, bertambah besarukuran pemerintah tidak selalu berakibat positif bagi pertumbuhan perekonomian. Sebagaimana dinyatakan oleh Gwartney (2000):

higher taxes and/or additional borrowing will impose an increasing burden of deadweight losses on the economy, as the size of government expands.

[†] Sesuai dengan penyajian data secara internasional seperti tercantum dalam International Financial Statistics-IMF ataupun World Table-World Bank, bagi hasil minyak bumi dan gas juga dikategorikan sebagai penerimaan pajak khususnya OTR. Dalam hal ini penulis juga menggunakan pemakaian istilah yang sama. Sedangkan NOTR dimaksudkan sebagai penerimaan pajak selain bagi hasil minyak, walaupun pajak yang dimaksud (mis: PPh 21 atau PPN) dibayar oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan minyak bumi atau perusahaan sejenis lainnya.

Pengeluaran pemerintah yang semakin besar menuntut pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan yang lebih besar juga. Apabila penerimaan pajak menjadi tumpuan utama, hal itu mengindikasikan pada makin besarnya pungutan pajak kepada warga negara. Hal ini berarti bahwa akan semakin banyak sumber produktif yang akan diambil oleh pemerintah dari pihak swasta yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan investasi. Jika dampak positif yang dihasilkan oleh pengeluaran pemerintah tidak mampu menutupi dampak negatif dari berkurangnya sumber daya dimiliki oleh pihak swasta, akan timbul *deadweight loss*.

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh para ahli ekonomi untuk menemukan hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan ukuran pemerintah negara yang bersangkutan. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa apabila hubungan antardua variabel tersebut digambarkan dalam suatu kurva, akan didapatkan kurva “U” terbalik sebagai berikut :



Gambar 1. Kurva Hubungan antara Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah

Sumber : Gwartney (2000:418)

Kurva pada Gambar 1 menunjukkan bahwa pada saat ukuran pemerintah masih kecil dan sebagian besar pengeluaran pemerintah ditempatkan pada sektor-sektor yang mempunyai keuntungan komparatif, ukuran pemerintah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam kondisi tersebut, semakin besar ukuran pemerintah semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Meskipun demikian, seiring dengan semakin besar ukuran pemerintah dan pengeluaran pemerintah yang banyak ditempatkan pada sektor-sektor yang tidak produktif, pertumbuhan ekonomi akan terganggu.

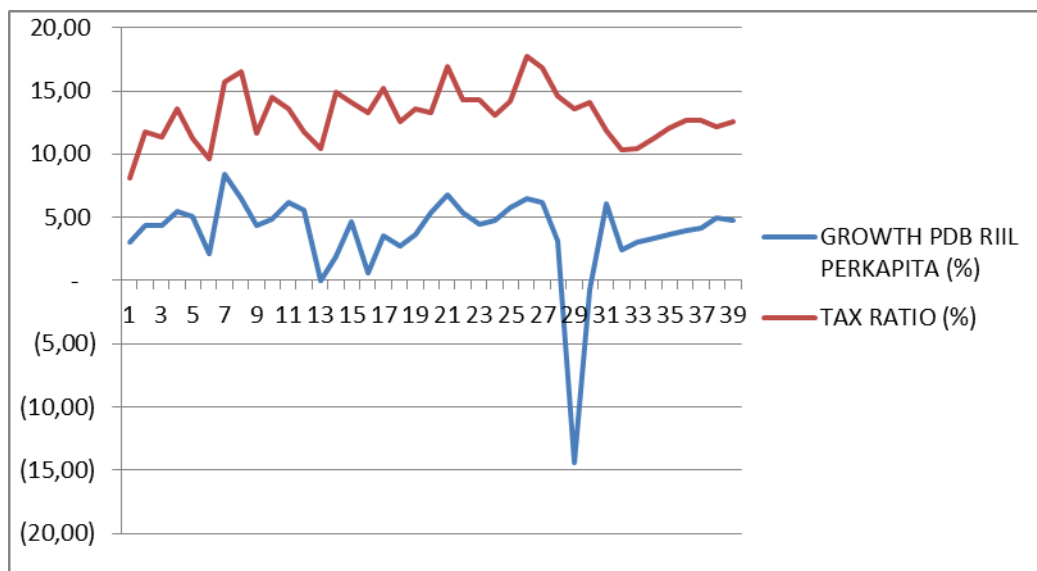
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah memungkinkan untuk menemukan tingkat tertentu dari ukuran pemerintah yang dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan mengasumsikan bahwa pemerintah menjalankan suatu sistem anggaran berimbang, yang didefinisikan sebagai suatu kondisi seluruh pengeluaran pemerintah dibiayai oleh penerimaan pajak, ditemukanlah suatu tingkat maksimum yang dikenal dengan istilah *the growth maximizing tax ratio* (selanjutnya disingkat GMTR). GMTR menunjukkan rasio jumlah penerimaan pajak terhadap PDB (selanjutnya ditulis rasio penerimaan pajak/ PDB) yang harus dicapai sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diwujudkan.

Berdasarkan data yang ada, hubungan *tax ratio* dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 1970 sampai dengan 2008 dapat digambarkan sebagai berikut:

Secara umum dari grafik diatas ditunjukkan bahwa ketika rasio penerimaan pajak/PDB tinggi, tingkat pertumbuhan PDB per kapita riil juga tinggi. Sebaliknya pada saat rasio penerimaan pajak/PDB masih rendah, tingkat pertumbuhan PDB per kapita riil juga cenderung rendah.

Oleh karena itu, penulis merasa bahwa sangat penting untuk melakukan penelitian dalam menemukan GMTR bagi Indonesia mengingat bahwa salah satu tujuan negara seperti yang tercantum dalam UUD 1945 adalah mensejahterakan kehidupan bangsa yang direpresentasikan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Grafik 2
Hubungan Tax Ratio dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Tahun 1970--2008



Sumber : DJP dan Nota Keuangan RI

Di sisi lain pemerintah saat ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada penerimaan sektor perpajakan. Disamping itu, GMTR juga dapat dijadikan acuan dalam merancang berbagai kebijakan fiskal pemerintah pada masa yang akan datang.

1.1 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Beberapa masalah pokok yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah besaran *tax ratio* memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia?
2. Berapakah besarnya GMTR untuk Indonesia? Apakah saat ini Indonesia belum, sudah mencapai, atau bahkan melampaui tingkat maksimum tersebut?

3. Apakah dampak yang akan muncul apabila GMTR tercapai, apabila saat ini Indonesia belum atau telah melewati tingkat maksimum tersebut?
4. Kebijakan-kebijakan apakah yang dapat diambil berkaitan dengan jawaban no 1 dan 2 diatas?

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi dan Peranan Pemerintah

Disamping faktor akumulasi modal dan perkembangan teknologi, para ahli ekonomi juga telah mencatat sumber-sumber lain yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, seperti tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, keterbukaan dalam perdagangan internasional, dan berbagai kebijakan pemerintah. Untuk kasus Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Sundrum, terdapat tiga faktor utama penyebab pertumbuhan perekonomian yang pesat selama periode 1968—1991, yaitu *“the improvement in the terms of trade, high rate of technical progress especially in agriculture and the expansionary domestic fiscal policy of government”* (Sundrum, Indonesia's Rapid Growth : 1968-1981, 1986).

Pentingnya peranan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara juga telah diakui oleh para ahli ekonomi dunia lainnya, salah satunya adalah Barro. Menurutny, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang diambil baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang (Barro, 1990). Termasuk dalam pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan jenis pengeluaran yang akan dilakukan dan jenis pajak yang akan dibebankan kepada warga negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut. Pada tahun 1995, Barro bersama Martin membangun suatu model yang menjadi dasar untuk menemukan GMTR yaitu

$$Y = AK \dots\dots\dots(2.1)$$

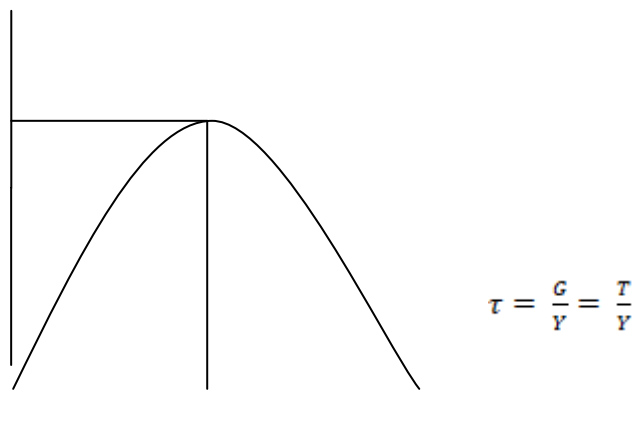
Model tersebut merupakan model paling sederhana dalam kategori *endogenous growth model* (keterangan: Y = total produksi, K = kapital (modal), dan A = suatu konstanta ($A > 0$) seperti teknologi). Dalam model ini dinyatakan segala sesuatu yang dapat mengubah level teknologi (A) dikatakan dapat memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti kebijakan perpajakan, dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi A tersebut sehingga pemerintah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam modelnya ini, Barro mengasumsikan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam proses produksi barang-barang publik. Pemerintah hanya membeli barang-barang dari pihak swasta dan kemudian menggunakannya untuk menyediakan barang publik yang selanjutnya akan digunakan oleh pihak swasta. Asumsi lainnya adalah bahwa pihak pemerintah dan swasta memproduksi output melalui fungsi produksi yang sama. Total pembelian pemerintah bersifat *non-rival* dan *non-excludable*, yang berarti penggunaan barang publik oleh satu pihak tidak mengurangi kuantitas barang yang tersedia untuk digunakan pihak lain. Fungsi produksi yang digunakan merupakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang menunjukkan *constant return to scale*, sehingga

$$Y = Ak^{1-\alpha}g^{\alpha} \dots\dots\dots(2.2)$$

Selanjutnya juga diasumsikan bahwa pemerintah menjalankan sistem anggaran berimbang, yaitu seluruh pengeluaran pemerintah dibiayai oleh penerimaan pajak ($G = T$) sehingga $g = \tau Y$. Dengan mensubstitusikannya ke dalam persamaan (2.2) serta memodifikasinya dan memperhitungkan kepuasan (*utility*) rumah tangga, model Barro jika digambarkan dalam bentuk kurva adalah sebagai berikut:

Barro menggambarkan hubungan ini dalam suatu kurva “U” terbalik untuk menunjukkan bahwa sampai pada titik maksimum tertentu, tarif pajak maksimal akan mendorong laju pertumbuhan konsumsi; konsumsi merupakan fungsi dari *utility* yang menggambarkan *welfare* atau *growth*.

Laju Pertumb. Konsumsi



Gambar 2. Hubungan antara Tingkat Perpajakan dan Laju Pertumbuhan Konsumsi
Sumber : Barro (1995)

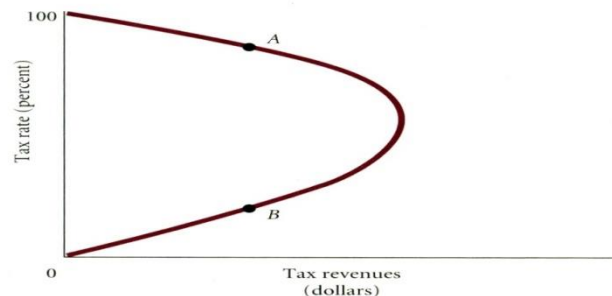
Dalam suatu pemerintahan, *growth* dapat diproksikan sebagai pertumbuhan PDB per kapita riil yang akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Setelah melewati titik maksimum tersebut, meningkatnya jumlah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah justru akan mengakibatkan menurunnya tingkat pertumbuhan PDB per kapita riil suatu negara.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan dalam mencari hubungan antara penerimaan perpajakan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan menggunakan fungsi kuadratik karena bentuk kurvanya menyerupai huruf “U” terbalik (Gujarati, 2003).

2.2 Dari *Laffer Curve* ke *Growth Maximizing Tax ratio*

Salah satu hasil penelitian yang sangat fenomenal di bidang perpajakan adalah diperkenalkannya *Laffer Curve* pertama kali oleh Arthur B. Laffer pada

tahun 1940 yang menggambarkan hubungan antara tarif pajak dan jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah[‡].



Gambar 3. *Laffer Curve*

Sumber : Texas Public Policy Foundation

Dalam *Laffer Curve* dijelaskan apabila tarif pajak adalah nol persen, otomatis tidak ada pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Hal yang sama akan terjadi apabila tarif pajak yang berlaku adalah seratus persen. Sangat jelas bahwa tidak akan ada orang yang mau bekerja apabila seluruh penghasilannya ditarik kembali oleh pemerintah dalam bentuk pajak. Pada saat tarif pajak bergerak dari titik nol persen, jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah akan bertambah seiring dengan meningkatnya tarif pajak. Hal tersebut akan terus berlangsung sampai pada suatu titik maksimum. Setelah melewati titik maksimum, peningkatan tarif pajak akan mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah.

Berbagai hasil penelitian empiris yang telah dilakukan dalam bidang perpajakan membuktikan kebenaran hipotesis ini. Tarif pajak yang tinggi tidak hanya memengaruhi perilaku kerja seseorang, tetapi juga dapat memicu terjadinya perpindahan modal dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Selain itu, tarif pajak yang tinggi juga akan mendorong orang untuk tidak melaporkan sebagian atau keseluruhan pendapatan yang diterimanya.

[‡]Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif pajak yang digunakan untuk menghitung pajak terutang. Sebagai contoh tarif PPh sebagaimana dimuat dalam pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008

Penelitian-penelitian empiris yang terkait dengan *laffer curve* sangat mendominasi pada periode 1980-an. Pada tahun 1990-an, penelitian yang dilakukan oleh para ahli lebih difokuskan untuk mencari hubungan antara *the rate of taxation* (tingkat perpajakan) yang didefinisikan sebagai rasio penerimaan pajak/PDB dan tingkat pertumbuhan riil PDB. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pajak dapat memengaruhi keseluruhan sistem perekonomian, sehingga *Laffer Curve* dapat diobservasi dalam kerangka yang lebih luas untuk mencari hubungan antara tingkat perpajakan suatu negara dan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

Scully (1995) menyatakan bahwa sampai dengan suatu level tertentu, jumlah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah yang kemudian digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa dapat membuat keseluruhan sistem perekonomian lebih produktif. Tanpa adanya peran pemerintah (misalnya dalam menyediakan infrastruktur dan memelihara keamanan nasional), pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit untuk diwujudkan. Artinya, sampai dengan level tertentu, berkurangnya satu unit produksi barang-barang swasta (*private goods*) akibat adanya pajak yang dikenakan oleh pemerintah justru akan menghasilkan lebih dari satu unit total produksi nasional. Akan tetapi, diluar level tersebut, pemerintah menggunakan hasil penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tidak produktif, berkurangnya satu unit produksi barang-barang swasta akan mengakibatkan berkurangnya total produksi nasional lebih dari satu unit; dengan kata lain rusaknya pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu titik optimal bahwa terdapat rasio penerimaan pajak/PDB tertentu yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Titik tersebut dikenal dengan *growth maximizing tax ratio* (GMTR).

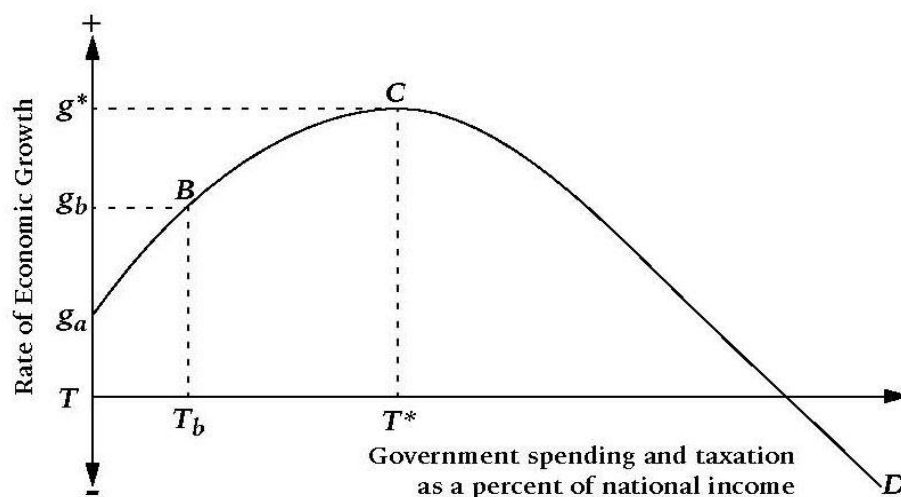
Dalam tataran teoretis, Robert J. Barro dan Xavier Sala-I Martin dapat dipandang sebagai pioner yang secara teoretis memperkenalkan GMTR ini (Barro dan Martin, 1995) seperti dijelaskan diatas.

Selain itu, dalam tataran empiris berbagai penelitian juga telah dilakukan oleh para ahli ekonomi, diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Gerald W. Scully pada tahun 1995 telah melakukan penelitian empiris untuk

menemukan GMTR bagi Amerika Serikat. Metode yang digunakan oleh Scully adalah metode ekonometrik berdasarkan dua persamaan (model) regresi. Untuk model yang pertama, Scully melakukan regresi berdasarkan fungsi kuadratik yang dapat dikatakan berdasarkan model teoretis yang telah dikembangkan oleh Barro. Untuk model yang kedua, Scully melakukan regresi berdasarkan model teoretis yang diciptakannya sendiri. Asumsi dasar model Scully adalah bahwa terdapat dua sektor yang beroperasi dalam suatu sistem perekonomian, yaitu sektor swasta dan sektor pemerintah. Kedua sektor itu berperan dalam menghasilkan produksi nasional melalui suatu bentuk fungsi produksi yang dikenal dengan istilah *cobb douglass production function*. Melalui dua model regresi tersebut, Scully mengestimasi GMTR untuk Amerika Serikat sebesar 22,9%. Artinya, jumlah penerimaan pajak yang seharusnya dikumpulkan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah 22,9% dari total PDB untuk dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal bagi negara tersebut. Selanjutnya, Scully mengestimasi bahwa apabila rasio ini dapat dicapai, pertumbuhan PDB riil Amerika Serikat setiap tahun dapat diperkirakan akan mencapai 5%. Selain itu, Scully juga menghitung *deadweight loss* yang muncul akibat rasio penerimaan pajak terhadap PDB Amerika Serikat saat ini jauh di atas GMTR, yaitu jumlah *deadweight loss* tersebut mencapai \$1.033 miliar per tahunnya.

Kennedy (2000) mengomentari hasil temuan Scully dengan menyatakan bahwa pada satu sisi Kennedy menyetujui penggunaan fungsi kuadratik sebagai alat untuk memperkirakan GMTR. Pada sisi lain, Kennedy menganggap bahwa model regresi kedua yang dilakukan Scully tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan GMTR, karena dalam model kedua Scully mengabaikan peranan modal sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Scully (1996) juga menggunakan dua model regresi ini untuk mengestimasi GMTR bagi Selandia Baru. Scully menemukan bahwa untuk kasus Selandia Baru, GMTR berada pada kisaran 19,7%--20,2%. Scully juga memperkirakan bahwa apabila GMTR ini dapat dicapai oleh Selandia Baru, tingkat pertumbuhan PDB riil setiap tahun diharapkan mencapai angka 5%.

Penelitian empiris lainnya dilakukan oleh Chao dan Grubel (1998) dalam menemukan GMTR bagi Kanada dengan menggunakan metodologi yang hampir sama dengan yang digunakan Scully. Perbedaan di antara kedua penelitian ini adalah Chao dan Grubel menggunakan data rasio jumlah pengeluaran pemerintah/PDB sebagai estimator variabel tingkat perpajakan. Hal tersebut berbeda dengan Scully yang menggunakan rasio jumlah penerimaan pajak/PDB. Namun, keduanya merupakan hal yang sama karena adanya asumsi $G = T$. Chao dan Grubel menemukan bahwa GMTR untuk Kanadasebesar 34%. Dasar Chao dan Grubel menghitung GMTR Kanada adalah menggunakan Scully Curve yaitu



Gambar 4. *Scully Curve*

Sumber : Chao and Grubel (1998)

Scully curve dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada saat pengeluaran pemerintah yang diasumsikan dibiayai seluruhnya dari penerimaan perpajakan berada di titik nol, pertumbuhan ekonomi berada pada g_a , yang merupakan pertumbuhan ekonomi terendah karena perekonomian mengalami inefisiensi akibat pemerintah tidak mempunyai dana untuk menghasilkan barang publik. Dengan asumsi tidak terjadi perubahan pada sektor swasta, yaitu pada *supply* kapital, tenaga kerja dan sumber daya lainnya, pemerintah melakukan *spending*

pada titik T_b , pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan menuju titik g_b karena pemerintah mulai menyediakan barang publik yang akan menstimulasi perekonomian. Tingkat pemerintah *spending* yang optimal berada di titik T^* karena pada titik tersebut pertumbuhan ekonomi berada pada titik tertinggi, yaitu g_* . Namun, apabila pemerintah terlalu besar melakukan pengeluaran yang berarti, hal itu akan menggenjot penerimaan pajak melalui kenaikan tarif pajak. Dalam kurva Scully digambarkan pada titik sebelah kanan T^* justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi karena tarif pajak yang terlalu tinggi akan menyebabkan sektor swasta mengalami penurunan aktivitas. Hal itu disebabkan penghasilannya berkurang akibat pajak yang tinggi.

Sebenarnya, konsep GMTR ini mempunyai kelebihan dan kelemahan jika diterapkan di Indonesia. Kelebihan dan kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Kelebihan
 - Dapat menentukan suatu titik optimal (rasio pajak optimal) yang selama ini belum ditentukan supaya dapat dijadikan pedoman untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dipenuhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
 - Karakteristik *tax ratio* di Indonesia selama tahun 1970 s.d. 2008 telah menggambarkan bentuk kurva U terbalik sesuai teori Barro dan Laffer Curve sehingga memungkinkan ditentukan suatu titik optimal yang disebut GMTR.
- Kelemahan
 - Asumsi bahwa pengeluaran pemerintah sepenuhnya dibiayai oleh penerimaan perpajakan ($G = T$) kurang memenuhi di Indonesia, karena Indonesia menganut sistem anggaran defisit, tetapi untuk meminimalisasinya, model penelitian ditambah dengan variabel independen rasio penerimaan bukan pajak dan rasio utang luar negeri.

2.3 Hubungan kausalitas penerimaan perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi

Ada dua pendapat yang menyatakan pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapat pertama menyatakan bahwa penerimaan pajak akan mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapat kedua menyatakan sebaliknya bahwa penerimaan pajak akan mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendapat yang pertama diusung oleh Keynes yang menyatakan bahwa Y (pendapatan nasional) merupakan fungsi dari konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran pemerintah (G), investasi (I), dan net ekspor (NE), sedangkan pajak (T) akan mengurangi konsumsi rumah tangga (C). Akibatnya, semakin besar pajak yang dikenakan, C akan semakin kecil, efeknya Y juga akan menurun; apabila Y dapat diproksikan sebagai pertumbuhan ekonomi, semakin besar penerimaan pajak akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Pendapat kedua dikemukakan antara lain oleh Peacock dan Wiseman (1961) yang pada intinya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk membiayai pengeluaran tersebut pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang besar, antara lain pajak. Namun, masyarakat juga mempunyai perilaku yang tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat bahwa masyarakat dapat memahami besar pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi, masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Selain itu, ada John Due (1968) yang mengemukakan bahwa pemerintah dapat memengaruhi tingkat PDB riil dengan mengubah persediaan berbagai faktor

yang dapat dipakai dalam produksi melalui program-program pengeluaran pemerintah, seperti pendidikan dan Steven A.Y.Lin (1994) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan laju yang semakin mengecil.

Baik Peacock dan Wiseman, John Due, maupun Steven A.Y Lin sebenarnya mempunyai pemikiran yang senada dengan Barro dan Laffer yang pemikirannya telah dijelaskan diatas dan menjadi dasar penelitian empiris Scully serta Chao dan Grubel yang menyadari bahwa terdapat titik optimal penerimaan pajak yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal pula. Titik optimal tersebut disebut GMTR. Apabila titik tersebut terlampaui, justru hal itu akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi karena telah melampaui batas toleransi masyarakat dalam membayar pajak, sehingga akan menyebabkan masyarakat berusaha menghindari pajak melalui berbagai cara. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan yang tetap membuat masyarakat berada dalam batas toleransi tersebut; dengan kata lain agar tetap berada dalam titik GMTR.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Seperti telah dijelaskanterdahulu, salah satu tujuan penelitian ini adalah menemukan GMTR bagi Indonesia. Jadi, ruang lingkup objek penelitian ini adalah skala nasional dalam arti negara Republik Indonesia. Hal itu perlu dilakukan agar disadari dan dipahami besartax ratio yang optimal (GMTR) yang seharusnya dicapai dibandingkan tax ratio Indonesia saat ini, apakah sudah mencapai level optimal atau belum.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel tidak bebas (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*). Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan PDB perkapita riil yang merupakan proksi dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Variabel bebas yang digunakan adalah tax ratio yang merupakan rasio penerimaan pajak/PDB, kuadrat dari tax ratio

tersebut, rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap PDB, rasio Utang Luar Negeri terhadap PDB serta variabel *dummy* reformasi perpajakan 1983 dan krisis ekonomi 1998.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dan kuantitatif yang bertujuan memberikan gambaran, mengkaji, dan menguji keberadaan teori secara empirik dari variabel-variabel yang telah diformulasikan ke dalam hipotesis, yang selanjutnya akan dianalisis pengaruh atau hubungan antarvariabel tersebut berdasarkan data empirik dengan metode *explanatory research*.

3.3 Penelitian terdahulu

- Gerald W Scully

Scully melakukan dua kali penelitian. Pertama, pada tahun 1995 ia mengestimasi GMTR bagi Amerika Serikat. Kedua, pada tahun 1996 bagi Selandia Baru. Model yang digunakan adalah

1. model yang berdasarkan fungsi kuadrat yang pada hakikatnya berasal dari model yang dikembangkan Barro, yaitu $Y = \alpha + \beta_1 \tau + \beta_2 \tau^2$

Keterangan:

Y : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

τ : Penerimaan Pajak/PDB

2. Model Scully yang bersumber pada premis dasar bahwa apapun faktor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara, pemerintah tetap memegang peranan yang sangat penting di dalamnya. Dengan demikian, dalam modelnya Scully mengasumsikan bahwa dalam suatu perekonomian terdapat dua sektor yang beroperasi, yaitu pemerintah dan swasta. Pemerintah memberikan pelayanan publik baik yang berasal dari hasil produksinya sendiri maupun yang dibelinya dari pihak swasta dan kemudian membayarnya dari pajak yang dikumpulkan. Diasumsikan bahwa pemerintah menjalankan sistem anggaran berimbang dengan total keseluruhan pengeluaran pemerintah sama dengan jumlah penerimaan

pajak. Dari hasil estimasi Scully disebutkan bahwa GMTR untuk Amerika Serikat adalah 22,9%, sedangkan untuk Selandia Baru berkisar 19,7%--20,2%.

- Johny C.P Chao dan Herbert Grubel (1998)

Dalam penelitiannya untuk mengestimasi GMTR di Kanada, mereka menggunakan model dari Scully yang berupa fungsi kuadratik:

$$Y = \alpha + \beta_1 \tau + \beta_2 \tau^2$$

Y : Tingkat pertumbuhan ekonomi

τ : Pengeluaran pemerintah/PDB

Berdasarkan penelitian tersebut, estimasi GMTR untuk Kanada berada pada level 34% dengan data pengeluaran pemerintah tahun 1929–1996.

3.4 Model dan Desain Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model empiris yang bersumber dari penelitian Gerald Scully (1995) tentang “*The Growth Tax in United States*” dan pada tahun 1996 tentang “*Taxation and Economic Growth in New Zealand*” serta Johny Chao dan Herbert Grubel (1997) tentang “*The Optimum Levels of Spending in Canada*” yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia untuk tahun 1970--2008. Adapun model yang digunakan penulis adalah

$$Y_t = \alpha + \beta_1 \tau_t + \beta_2 \tau_t^2 + \beta_3 NT + \beta_4 U + \beta_5 D1 + \beta_6 D2 + \varepsilon_t$$

Keterangan:

Y = Tingkat pertumbuhan PDB perkapita riil

α = Konstanta

τ = Tax ratio (penerimaan pajak / PDB)

NT = Rasio penerimaan negara bukan pajak terhadap PDB

U = Rasio utang luar negeri terhadap PDB

D1 = Variabel *dummy* reformasi perpajakan 1983

= 0 untuk masa sebelum reformasi perpajakan 1983

= 1 untuk masa reformasi perpajakan 1983 dan setelahnya

- D2 = Variabel *dummy* krisis ekonomi
= 0 untuk masa sebelum krisis ekonomi 1998
= 1 untuk masa krisis ekonomi 1998 dan setelahnya
- ε = *error term*

Selanjutnya, GMTR dapat dihitung dari turunan pertama dari model diatas dan menetapkannya sama dengan nol sehingga

- $\frac{\delta \gamma}{\delta \tau} = \beta_1 + 2 \beta_2 \tau = 0$
- $\tau = - \frac{\beta_1}{2\beta_2}$ dimana τ = GMTR

Dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah dibiayai sepenuhnya dari penerimaan pajak, untuk mengakomodasinya penulis menambahkan variabel rasio PNBPN terhadap PDB dan rasio Utang Luar Negeri terhadap PDB agar memenuhi asumsi $G = T$. Adapun variabel *dummy* reformasi perpajakan digunakan untuk melihat adanya pengaruh perubahan kebijakan perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui pada tahun 1983 terjadi reformasi perpajakan yang pertama kali, yaitu diubahnya sistem *official assessment* menjadi *self assessment* yang menjadi pondasi perubahan kebijakan perpajakan sampai dengan sekarang. Memang setelah itu terjadi reformasi perpajakan yang kedua tahun 1994 dan ketiga tahun 2000. Namun, hal itu tidak mengubah pola pembayaran wajib pajak dan lebih menitikberatkan disisi administrasi perpajakannya. Justru yang menjadi inti reformasi perpajakan adalah tahun 1983.

Variabel *dummy* krisis digunakan untuk mengetahui pengaruh krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan dunia pada tahun 1998 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data tingkat pertumbuhan PDB perkapita riil, penerimaan pajak, dan PDB di Indonesia dari tahun 1970 sampai dengan 2008 (*time series*). Penulis memakai data dari tahun 1970 karena tahun tersebut merupakan awal diberlakukan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mencerminkan perubahan perekonomian dari Orde

Lama ke Orde Baru menuju lebih stabil dan terencana dengan baik. Tahun 1970 sampai dengan 2000 menggunakan tahun anggaran yang tidak sama dengan tahun takwim, misalnya tahun anggaran 1970/1971 maka dimulai dari 1 April 1970 sampai dengan 31 Maret 1971, sehingga untuk kepentingan penelitian ini, berdasarkan contoh diatas penulis menganggap tahun data 1970 disandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 1970. Data tersebut dikumpulkan melalui kegiatan kompilasi data (*data compilation*) dari berbagai sumber yaitu Departemen Keuangan, DJP, IMF, Nota Keuangan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program MS Excel dan Eviews 5.0 terutama untuk estimasi dan pengujian model. MS Excel digunakan untuk entri data dan pengolahan data dasar, sedangkan Eviews digunakan untuk menganalisis dan menguji data secara statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi diperoleh menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan *White Heteroscedasticity Standard Error* (WHSE) guna meminimalkan risiko atas asumsi klasik heteroskedastisitas yang mungkin terjadi, karena dengan menggunakan WHSE, terdapat penyesuaian terhadap besaran minimum varian setiap koefisien variabel yang dianalisis.

4.1 Hasil Estimasi Model

Bentuk persamaan dari model yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 \tau + \beta_2 \tau^2 + \beta_3 NT + \beta_4 U + \beta_5 D1 + \beta_6 D2 + \varepsilon_t$$

Keterangan:

Y = Tingkat pertumbuhan PDB perkapita riil

α = Konstanta

τ = Tax ratio (penerimaan pajak / PDB)

NT = Rasio penerimaan bukan pajak terhadap PDB

- U = Rasio Utang luar negeri terhadap PDB
- D1 = Variabel *dummy* reformasi perpajakan 1983
= 0 untuk masa sebelum reformasi perpajakan 1983
= 1 untuk masa reformasi perpajakan 1983 dan setelahnya
- D2 = Variabel *dummy* krisis ekonomi
= 0 untuk masa sebelum krisis ekonomi 1998
= 1 untuk masa krisis ekonomi 1998 dan setelahnya
- ε = *error term*

Setelah diolah dengan menggunakan Eviews 5.1 memakai metode OLS dengan WHSE, diperoleh hasil sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Uji t untuk Model GMTR

Variabel	DF=(n-k)	α	t-tabel	t-hitung	Simpulan
τ	32	5 %	2,042	2,093128	Signifikan
		10 %	1,697		Signifikan
		5 %	2,042		Tidak Signifikan
τ^2	32	10 %	1,697	-1,745288	Signifikan
		5%	2,042		Signifikan
NT	32	10%	1,697	2,198981	Signifikan
		5%	2,042		Tidak Signifikan
U	32	10%	1,697	-1,447789	Tidak Signifikan
		5 %	2,042		Tidak Signifikan
D1	32	10 %	1,697	-1,919737	Signifikan
		5 %	2,042		Tidak Signifikan
D2	32	10 %	1,697	-0,492680	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil pengolahan data

4.2 Analisis Ekonomi dan Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil regresi dengan menggunakan metode OLS dan WHSE pada Tabel 1 diperoleh hasil pengujian koefisien secara parsial dengan uji t menunjukkan bahwa rasio penerimaan pajak terhadap PDB berpengaruh positif pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan koefisien regresi sebesar 3,400972.

Hasil tersebut memberi penjelasan bahwa setiap peningkatan 1% rasio penerimaan pajak terhadap PDB akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,400972 % (*ceteris paribus*). Hasil ini sejalan dengan penelitian Scully di Amerika Serikat ataupun Chao dan Grubel di Kanada yang menyatakan bahwa kenaikan rasio penerimaan pajak terhadap PDB akan berpengaruh positif pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Barro juga mengatakan hal yang sama bahwa pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan pajak akan berpengaruh positif pada kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan syarat pengeluaran pemerintah tersebut dipergunakan untuk membiayai pengeluaran yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur yang akan mendorong kegiatan perekonomian suatu negara.

Dari persamaan GMTR Tabel 1 juga disebutkan bahwa kuadrat rasio penerimaan pajak terhadap PDB mempunyai koefisien negatif dan signifikan pada tingkat 10%. Artinya, pada jangka panjang peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap PDB justru akan menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian Scully serta Chao dan Grubel. Fenomena ini juga sesuai menurut Peacock dan Wiseman (1961) yang pada intinya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk membiayai pengeluaran tersebut pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang besar, antara lain pajak. Namun, masyarakat juga mempunyai perilaku yang tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat yang masyarakat dapat memahami besarpungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi, masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk

membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Selain itu, John Due(1968) mengemukakan bahwa pemerintah dapat memengaruhi tingkat PDB riil dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi melalui program-program pengeluaran pemerintah, seperti pendidikan dan Steven A.Y.Lin (1994) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan laju yang semakin mengecil.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diungkapkan bahwa penulis menitikberatkan pengaruh variabel rasio pajak serta cara mendapatkan GMTR, maka untuk variabel lainnya hanya dipergunakan untuk memenuhi asumsi $G = T$ dan tidak dibahas pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, penulis menentukan besarnya GMTR bagi Indonesia berikut:

1. Hasil regresi model GMTR :

$$Y = -17,57043 + 3,400972 \tau - 0,116164 \tau^2 + 0,962364 \text{ NT} - 1,217723 \text{ U} - 6,738500 \text{ D1} - 0,795604 \text{ D2}$$

2. Optimal rasio pajak (GMTR) :

$$\bullet \quad \frac{\delta Y}{\delta \tau} = 3,400972 + 2(-0,116164)\tau = 0$$

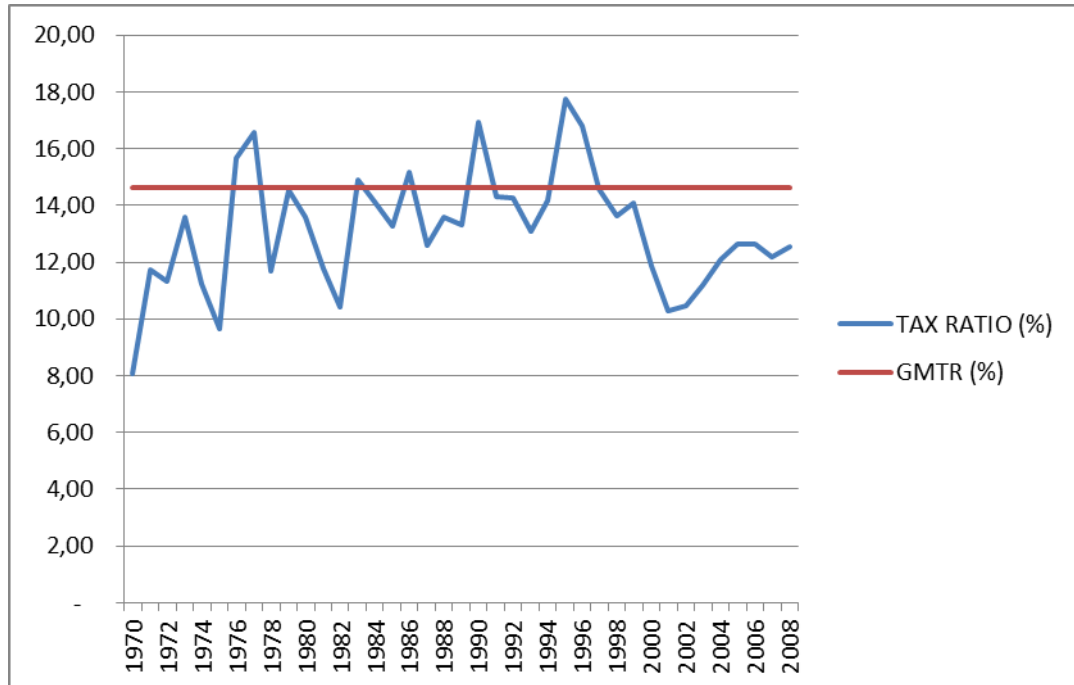
$$\bullet \quad \tau = -\frac{3,400972}{2(-0,116164)} = 14,64 \%$$

Jadi, berdasarkan estimasi model GMTR diatas, dapat diperoleh besarrasio pajak optimal di Indonesia adalah 14,64%.

Apabila dibandingkan rasio pajak selama periode 1970–2008 dengan GMTR yang seandainya telah dicapai sejak tahun 1970, akan terlihat dalam Grafik 3 sebagai berikut :

Dari Grafik 3 dan berdasarkan data yang ada, terlihat dengan jelas bahwa rasio pajak dibawah GMTR. Secara umum rata-rata rasio pajakperiode 1970–2008 adalah 13,3%, masih berada di bawah GMTR. Hanya berdasarkan data yang ada, di tahun 1976, 1977, 1983, 1990, 1995, dan 1996 rasio pajak aktualberada diatas GMTR 14,64%.

Grafik 3
Perbandingan Rasio Pajak Aktual dengan GMTR



Sumber : DJP, Nota Keuangan (diolah)

Hal itu mendukung hipotesis penulis bahwa pada saat ini rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia masih berada di bawah GMTR; dengan kata lain saat ini Indonesia masih berada di sisi kiri kurva “U” terbalik yang menggambarkan hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak.

Jika GMTR telah tercapai dari tahun 1970 dan dapat dipertahankan seterusnya, yang terjadi adalah total penerimaan pajak aktual periode 1970–2008 sebesar Rp3.915,06 triliun akan meningkat menjadi Rp4.554,09 triliun atau meningkat sebesar Rp 639,03 triliun. Sungguh suatu angka yang fantastis yang jika digunakan dengan benar dan produktif dengan memperhatikan kemakmuran rakyat, bangsa Indonesia akan menjadi jauh lebih makmur daripada sekarang.

Indikator lain yang dapat diperkirakan apabila GMTR telah tercapai dari tahun 1970 dan dapat dipertahankan sampai dengan sekarang, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi periode 1970--2008 sebesar 3,7% akan meningkat menjadi 7,3% dengan mensubstitusikan GMTR kedalam persamaan modelnya dan

menganggap variabel lainnya tetap. Hal itu lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008 lalu sebesar 4,7%.

Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai pekerjaan rumah yang berat agar bangsa Indonesia dapat mencapai GMTR yang optimal sebesar 14,64% sehingga perekonomian dapat menjadi lebih maju dan kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan teori Barro dan Scully, penerimaan pajak akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa penerimaan pajak yang digunakan untuk melakukan proyek yang produktif yang akan berpengaruh positif pada tingkat pertumbuhan ekonomi, misalnya pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, penerimaan pajak akan berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, misalnya untuk membayar utang. Apabila penerimaan pajak sebagian besar dialokasikan untuk membayar utang, porsi pembangunan hal-hal yang produktif akan berkurang sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi akan menurun. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat dalam mengelola penerimaan pajak ini agar dapat berpengaruh positif pada tingkat pertumbuhan ekonomi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkajibesarpenerimaan pajak yang digambarkan dalam bentuk suatu rasio penerimaan pajak terhadap PDB, menganalisisnya dan kemudian melihat pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta menentukan nilai rasio pajak yang optimal agar diperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Rasio pajak optimal tersebut adalah GMTR. Model yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *time series model* untuk wilayah negara Republik Indonesia dengan periode tahun 1970 –2008. Berdasarkan hasil estimasi persamaan GMTR dengan menggunakan metode OLS dan WHSE, dapat diambil beberapa simpulan berikut.

1. Variabel rasio penerimaan pajak terhadap PDB berpengaruh secara signifikan dan positif pada tingkat pertumbuhan ekonomi.

2. Penerimaan pajak yang digenjot secara terus-menerus justru akan berpengaruh negatif pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu digambarkan melalui variabel kuadrat rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang mempunyai pengaruh negatif dan signifikan.
3. Besar rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang optimal (GMTR) adalah 14,64%. Besarrasio tersebut harus dipertahankan agar penerimaan pajak tetap memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.
4. Apabila besaran GMTR tersebut telah terpenuhi sejak 1970, total penerimaan pajak sejak 1970–2008 akan meningkat kurang lebih 25% dari total penerimaan pajak aktual sekarang. Selain itu, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula menjadi dua kali lipat dari sekarang.

Rekomendasi Kebijakan

Dari simpulan di atas dapat diajukan beberapa rekomendasi kebijakan:

- A. Bagi pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, penulis merekomendasikan berikut :
 1. Besar rasio pajak optimal dapat dijadikan acuan untuk menetapkan target penerimaan pajak yang realistis dan kebijakan perpajakan yang efektif dan efisien untuk memenuhinya.
 2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan intensifikasi perpajakan melalui menggali potensi wajib pajak yang telah terdaftar agar membayar pajak dengan benar, serta ekstensifikasi perpajakan dengan menarik seseorang atau badan hukum yang belum menjadi wajib pajak, tetapi disinyalir telah memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak agar ditetapkan sebagai wajib pajak. Berdasarkan pengalaman penulis, langkah konkret untuk intensifikasi adalah dengan melakukan pengamatan dan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, kemudian dilakukan himbuan, bukan dengan pemeriksaan karena hasilnya lebih efektif dan mengena. Kebijakan kenaikan tarif sebaiknya dilakukan sebagai alternatif terakhir karena tarif pajak di Indonesia terutama untuk Pajak Penghasilan (PPh) sudah

terlalutinggi. Ada pun untuk ekstensifikasi adalah melalui koordinasi antarinstansi, misalnya menggolkan kebijakan *single identification number* (SIN) sehingga identitas seseorang hanya tunggal dan ini memudahkan pengawasan perpajakannya.

3. Mempermudah administrasi pembayaran dan pelaporan pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa dipersulit saat membayar pajak, misalnya dengan melalui ATM perbankan sehingga tidak perlu antre. Hal itu sudah dilakukan untuk pembayaran PBB atau PPh Final UKM, maupun untuk jenis pajak-pajak yang lain. Hanya perlu lebih ditingkatkan kemudahan membuat *e-billing* agar pembayaran oleh Wajib Pajak menjadi lebih nyaman.
4. Meningkatkan kualitas kemampuan teknis dan moral sumber daya manusia DJP agar senantiasa *update* dengan perkembangan zaman serta tetap menjalankan tugasnya dengan profesional.
5. Memberikan kepastian hukum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, misalnya dengan memberikan *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak ataupun tugas pajak. *Reward* terhadap wajib pajak misalnya dengan adanya kebijakan *sunset policy*, yaitu memberikan pembebasan sanksi perpajakan apabila wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya pada waktu yang lalu yang pembayarannya tidak benar. Hal tersebut telah dilakukan dan mendapatkan reaksi yang positif dan lebih baik jika dilanjutkan secara kontinu. *Punishment* dapat diberikan berupa sanksi yang tegas baik denda maupun kurungan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan.
6. Meningkatkan kerja sama pertukaran data dengan pihak ketiga untuk menggali potensi perpajakan, misalnya data pembelian atau penjualan rumah melalui notaris atau pembelian dan penjualan mobil dengan kepolisian.
7. Berdasarkan hasil regresi model GMTR, disimpulkan bahwa kebijakan reformasi perpajakan tahun 1983 yang mengubah sistem *official assessment* ke *self assessment* ternyata berpengaruh tidak signifikan pada

tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal itu dapat dijelaskan bahwa dengan perubahan sistem tersebut ternyata justru menimbulkan *moral hazard* bagi wajib pajak untuk mengecilkan penghitungan pajaknya, karena dengan sistem *self assessment*, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh sebab itu, menjadi *warning* bagi pemerintah untuk menciptakan sistem yang mampu mendeteksi kecurangan-kecurangan pembayaran pajak sehingga risiko bahwa wajib pajak tidak melaporkan pajak yang sebenarnya dapat terdeteksi. Serta dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggaran di bidang perpajakan dan dilaksanakan dengan benar dan sungguh-sungguh untuk menjamin kepastian hukum.

8. Selalu melakukan evaluasi terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan apakah sudah tepat dengan situasi dan kondisi terkini atau belum.

B. Untuk Pengembangan Studi

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih luas dan mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi pengembangan di bidang ilmu ekonomi subbidang keuangan negara dan daerah khususnya berkaitan dengan peranan pajak dalam menunjang penerimaan negara dan memajukan pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Barro, R. J. and Sala-I Martin, X.(1995). *Economic growth*. New York: McGraw Hill.
- Barro, R.J.(1993). *Macroeconomics*. John Wiley & Sons.
- Barro, R.J.(1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98, S103-S125.
- Chao, J. C.P. and Grubel,H.(1998). Optimal levels of spending and taxation in Canada. In *How to use the fiscal surplus: What is the optimal size of government*, Herbert Grubel (ed). Vancouver: Fraser Institute.

- Due, J. F.(1968). *Government Finance: Economics of the Public Sector*. Illinois:Irwin.
- Gujarati, D.(2003). *Basic econometrics*. New York: McGraw Hill.
- Gwartney, J. D., Stroup, R. L.and Sobel,R. S. (2000). *Economics: Private and public choice*. The Dryden Press.
- Helms, L.J.(1985). The effect of state and local taxes on economic growth : A time series cross section approach. *The review of Economics and Statistics* : 574-582.
- Hill, H.(2001). *Ekonomi Indonesia*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kennedy, P. E.(2000). On measuring the growth maximizing tax rate. *Pacific Economic Review*, 5 : 89-91.
- Lin, S. A. Y.(1994). Government spending and economic growth. *Applied Economics Journal*, 26 :83-94.
- Mansury, R. (1996). *Pajak penghasilan lanjutan*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Mansury, R. (1999). *Kebijakan fiskal*. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Peacock, A. T. danWiseman. (1961). The growth in national expenditure and national income. *National Bureau of Economic Research*, 72.
- Scully, G. W. (1995). The growth tax in the United States. *Public Choice*, 85: 71-80.
- Scully, G. W.(1996). Taxation and economic growth in New Zealand. *Pacific Economic Review*, 1: 169-177.
- Sundrum, R.M.(1986). Indonesia's rapid growth: 1968--1981. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*,22: 40-69.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.